



TEKNOLOGI PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN PERTANIAN ORGANIK YANG BERKELANJUTAN

Hana Indriana¹

¹Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Email korespondensi : hanaindriana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan sistem pertanian organik tidak hanya menunjukkan adanya perubahan dalam teknik budidaya tanaman dari sistem pertanian konvensional menjadi organik, namun juga meliputi perubahan-perubahan dalam interaksi dan relasi aktor, tata aturan, nilai, dan norma yang dibangun, dan pengelolaan sumber daya yang dimanfaatkan. Perubahan-perubahan tersebut mendorong terbangunnya kelembagaan yang berperan untuk memperkuat dan meningkatkan manfaat dari sistem pertanian organik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan diharapkan dapat terbangun untuk menjamin pemanfaatan yang terus-menerus dari penerapan sistem pertanian tersebut. Adapun teknologi partisipatif menjadi upaya untuk mewujudkan dan memperkuat kelembagaan tersebut. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis penerapan teknologi partisipatif dalam mendukung penguatan kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan. Tulisan ini merupakan hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Desember 2014 sampai Mei 2015 di Gabungan Kelompok Tani Simpatik Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan berperan serta dan didukung oleh data sekunder yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses diskusi melalui metode ORID, upaya membangun konsensus melalui kegiatan lokakarya, dan proses perencanaan aksi melalui workshop merupakan rangkaian teknologi partisipatif dalam pengorganisasian komunitas dan penerapan teknik sosial yang menjadi salah satu alternatif dalam rangka penguatan kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan

Kata kunci: pertanian organik, teknologi partisipatif, kelembagaan

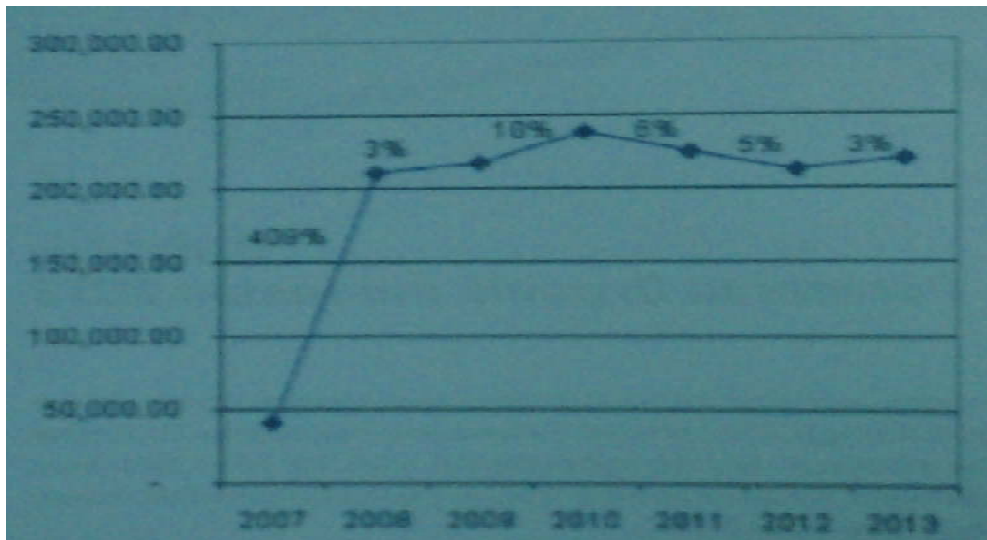
PENDAHULUAN

Perkembangan pertanian organik cukup signifikan baik di level lokal, nasional, regional, maupun global dalam dua dekade terakhir ini dan *organic farming has matured enough to offer lesson* (Lockeretz, 2007). Indikasinya adalah semakin bertambahnya luas lahan penanaman dan juga pertumbuhan pasar produk organik tersebut. Tercatat sampai tahun 2003, total luas lahan yang dikelola secara organik di dunia 24 juta hektar. Adapun luasan lahan organik di Indonesia meningkat drastis di tahun 2008 dan terus menanjak hingga tahun 2010, kemudian bergerak turun hingga tahun 2012 dan mulai merangkak naik di tahun 2013, dari luas 212.696,65 di tahun 2012 (Gambar 1). Lahan yang disertifikasi LSO Nasional seluas 24.964,14 Ha (33 persen), sedangkan lahan yang disertifikasi oleh LSO Internasional seluas 51.049,06 Ha (67 persen) (Ariesusanty *et.al.*, 2014).



Herdiman (2008) mengemukakan bahwa peningkatan perluasan lahan pertanian organik dan penjualan produk organik dirasa membanggakan di tengah gempuran produk kimia yang merajai pasaran saat ini. Total penjualan produk organik di seluruh dunia mencapai US\$ 23 miliar. Pasar produk organik utama dunia yaitu di Amerika Serikat dan Kanada juga semakin besar hingga mencapai 51 persen atau US\$ 11 miliar, disusul Eropa sebesar US\$ 10 (46 persen), kemudian Jepang sebesar US\$ 350 juta. Pertumbuhan pasar produk organik diperkirakan mencapai 20-30 persen per tahun. Bahkan di beberapa negara tertentu mencapai 50 persen per tahun. Kenaikan nilai penjualan produk telah mencapai 10 persen dari jumlah penduduk. Menurut Gardjita Budi dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, setiap tahun pasar organik dunia tumbuh 20 persen. Pada 2009 nilai bisnis organik mencapai 22 miliar dollar AS dan pada 2012 mencapai 65 miliar dollar AS (Kompas, 2014).

Dengan berkembangnya pertanian organik hingga saat ini, memberi gambaran bahwa manfaat yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pangan organik. Sebagaimana berkembangnya pertanian modern, berbagai bentuk kelembagaan pertanian modern muncul dan memberikan pengaruh yang sangat besar. Demikian pula halnya dengan pertanian organik yang semakin banyak diterapkan oleh masyarakat selama ini, tentunya memunculkan bentuk-bentuk kelembagaan yang berbeda dengan kelembagaan pada pertanian modern. Ditinjau dari pendekatan kelembagaan, keberlanjutan dalam sistem pertanian organik merupakan keberlanjutan dalam kelembagaan sistem pertanian organik itu sendiri.



Sumber : Statistik Pertanian Organik Indonesia 2013

Gambar 1. Persentase Pertumbuhan Lahan Organik Indonesia pada tahun 2007 – 2013 (dalam hektar)

Pada tahun 2004, hasil penelitian Indriana menunjukkan bahwa dalam penerapan teknik budidaya kentang, para petani kentang di Kecamatan Pangalengan sudah merumuskan teknik penerapan budidaya kentang sesuai dengan konteks lokal. Rumusan tersebut menjadi bagian dari tata aturan kelompok petani kentang dalam memproduksi kentang secara organik. Lebih lanjut, hasil penelitian Indriana (2012) menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kelembagaan dalam sistem pertanian padi sehat yang sama dengan kelembagaan pada sistem pertanian padi non-organik yaitu kelembagaan penguasaan lahan, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan panen. Perbedaan tampak dengan adanya mekanisme yang membentuk kelembagaan penyedia pupuk dan pestisida, kelembagaan Koperasi Kelompok Tani “penyedia sarana pertanian”, kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pasca panen, dan kelembagaan distribusi beras dengan merk SAE yaitu Sehat, Aman, dan Enak sebagai produk padi organik dari Kampung Ciburuy yang terjamin sehat dan aman karena bebas residu pestisida dan enak untuk dikonsumsi. Terbangunnya kelembagaan-kelembagaan tersebut menjadi ruang bagi para petani untuk membangun kembali semangat kegotongroyongan, nilai kerjasama, nilai memaksimalkan keuntungan baik secara ekonomi dari hasil produksi produk organik, secara sosial dengan menguatnya nilai-nilai kolektivitas, dan secara ekologi dengan penerapan teknik pertanian yang ramah terhadap lingkungan.



Dalam konteks perkembangan sistem pertanian organik tidak hanya menunjukkan adanya perubahan dalam teknik budidaya tanaman dari sistem pertanian konvensional menjadi organik, namun juga meliputi perubahan-perubahan dalam interaksi dan relasi aktor, tata aturan, nilai, norma yang dibangun, dan pengelolaan sumber daya yang dimanfaatkan. Perubahan-perubahan tersebut mendorong terbangunnya kelembagaan yang berperan untuk memperkuat dan meningkatkan manfaat dari sistem pertanian organik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan diharapkan dapat terbangun untuk menjamin pemanfaatan yang terus-menerus dari penerapan sistem pertanian tersebut. Adapun metode *Technology of Participation* (ToP) digunakan untuk menjelaskan proses-proses terbangunnya kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan di Gabungan Kelompok Tani Simpatik Kabupaten Tasikmalaya. Sehubungan dengan itu, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan penerapan metode teknologi partipatif dalam mendukung terbangunnya kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Desember 2014 sampai Mei 2015 di Gabungan Kelompok Tani Simpatik Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada beberapa informan, pengamatan berperan serta dalam kegiatan diskusi, serta didukung oleh data sekunder yang relevan dengan memanfaatkan data-data kelompok dari Gapoktan Simpatik, data statistik pertanian organik dari Aliansi Organik Indonesia, jurnal-jurnal dan buku-buku teks yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah para pengelola di sekretariat Gabungan Kelompok Tani Simpatik Kabupaten Tasikmalaya, dan para ketua kelompok tani anggota Gapoktan Simpatik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu permasalahan yang terkait dengan upaya-upaya mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah pentingnya dukungan kelembagaan yang sesuai diantara rumah tangga para individu, perusahaan swasta dan organisasi publik yang mencakup pemerintah daerah juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat (Rattan *dalam* Eicher, 1998).



Merujuk pada Lele (1991), dari arti katanya, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu frase yang terdiri dari konsep keberlanjutan (*sustainability*) dan pembangunan (*development*). Keberlanjutan itu sendiri dapat dikonotasikan baik secara harfiah, secara ekologis, maupun secara sosial. Adapun konsep pembangunan dapat dikonotasikan dari segi proses maupun dari segi tujuannya. Keberlanjutan secara sosial dapat diartikan sebagai keberlanjutan basis sosial dari kehidupan manusia, dan ini terkait dengan konsep pembangunan yang lebih ditekankan pada aspek tujuannya yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia tersebut. Sehubungan dengan hal ini, maka dapat diinterpretasikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah mengutamakan dan memberikan arti penting pada tercapainya tujuan yang tradisional dan keberlanjutan secara ekologis dan sosial.

Pembangunan pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya merupakan proses menuju perubahan ke arah penghidupan yang lebih baik. Arah perubahan secara gradual ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat yakni menguatkan relasi kerjasama antara pelaku pertanian organik dan kohesivitas kelompok, meningkatkan pendapatan petani dengan adanya kepastian harga jual beras organik, dan meningkatkan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam berbudidaya padi serta menjamin kesuburan tanah. Demikianlah pembangunan pertanian organik merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan baik secara sosial, ekonomi, dan ekologi.

Padmanabhan and Beckmann (2009) menguraikan bahwa kelembagaan-kelembagaan sebagai sekumpulan aturan membentuk perilaku manusia serta struktur interaksi sosial, politik dan ekonomi. Namun, peraturan tidak tampak memaksa hingga dibuat secara eksplisit dalam bentuk tertulis. Perilaku manusia dan struktur interaksi - dalam bentuk pasar, perusahaan, rumah tangga atau birokrasi - semuanya relatif mudah diamati, tetapi seringkali sulit untuk menyimpulkan aturan yang mendasarinya. Perilaku aktual mungkin melanggar aturan yang ditetapkan, dan tampaknya struktur serupa dapat mengandalkan aturan sangat berbeda. Oleh karena itu, salah satu tujuan penting dari penelitian empiris dalam kelembagaan adalah untuk mengidentifikasi, menggambarkan dan mengklasifikasikan aturan. Analisis lebih lanjut memerlukan identifikasi dan pengukuran kelembagaan.

Konsep dasar untuk mengidentifikasi kelembagaan telah dikembangkan oleh Crawford dan Ostrom dalam kerangka Grammar Kelembagaan (Padmanabhan dan Beckmann, 2009). Menurut mereka, karakteristik utama dari semua kelembagaan dapat diungkapkan melalui sintaks ADICO yakni Attributes pelaku; Deontis, untuk apa aktor diwajibkan, dilarang atau diizinkan untuk melakukan; Tujuan, menggambarkan tindakan tertentu atau hasil terhadap



pencapaian yang telah ditetapkan unsur deontis; Kondisi di mana aturan berlaku (di mana dan kapan); dan atau yang lain, menggambarkan konsekuensi dari melanggar aturan. Sebuah contoh mungkin dapat membantu dalam menggambarkan penggunaan sintaks ADICO yakni "Semua peserta lalu lintas harus berhenti di persimpangan jika lampu merah atau mereka akan didenda dan akan bertanggung jawab untuk semua akibat kerusakan". Aturan ini dapat diubah dengan cara yang sangat berbeda dengan mengubah atribut, deontis, tujuannya, kondisi atau formulasi lain. Dengan sintaks ADICO, aturan formal atau informal yang dibuat transparan dengan menggunakan bahasa yang sama. Namun, format ini mengacu pada aturan tunggal, sedangkan sering istilah "kelembagaan" digunakan untuk seperangkat aturan (Padmanabhan and Beckmann, 2009). Kelembagaan dipahami sebagai seperangkat aturan formal dan informal, termasuk tata laksana pengaturan (*the rules of the game* yang bertujuan untuk mengarahkan perilaku individu ke arah tertentu). Berbicara tentang pasar, perusahaan, atau kepemilikan sebagai kelembagaan biasanya memerlukan pengakuan yang relatif besar terhadap serangkaian aturan yang mendefinisikannya. Untuk setiap jenis interaksi, Ostrom mempertimbangkan setidaknya tujuh tipe aturan yang relevan yakni orang-orang pada posisinya, batasan, pilihan, agregasi, informasi, hasil atau pembayaran, dan ruang lingkup. Jadi, hal ini penting selama memformulasikan strategi empiris, untuk mengakui perbedaan-perbedaan dalam konsep-konsep kelembagaan, khususnya ketika tujuh tipe tersebut mengandalkan pada aturan-aturan individual atau seperangkat aturan.

Kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan dalam pengembangan pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya melibatkan beragam aktor dengan penciri masing-masing, yang memiliki peran, status, hak dan kewajiban, memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan secara ekonomi, sosial dan ekologi. Para petani yang menjadi anggota kelompok tani dan bergabung di Gapoktan Simpatik memiliki peran penting sebagai produsen beras organik, pelestari lahan sawah, dan penyedia beras organik bagi Gapoktan Simpatik. Sementara pengelola Gapoktan Simpatik memiliki peranan penting dalam mengelola tata aturan penyediaan beras, pemenuhan pesanan beras, dan pengiriman beras ke luar negeri. Di samping itu, Gapoktan Simpatik turut memberdayakan petani organik sebagai anggotanya dengan memberikan informasi yang dibutuhkan petani seperti pengentasan hama penyakit tanaman padi, membuka kesempatan mengakses pelatihan, membuka jaringan dengan akademisi, LSM, pemerintah bahkan dengan lembaga internasional seperti halnya dengan lembaga sertifikasi *Institute Market of Ecology* (IMO). Pemerintah setempat juga turut mendukung dalam pengembangan pertanian organik terlebih dengan adanya peran Badan Penyuluhan Pertanian sebagai pendamping petani di lapangan. Adanya eksportir menjadi media distribusi beras organik



ke pasar luar negeri. Pertanian organik tidak hanya berkembang dengan adanya dukungan status dan peran para aktor. Akan tetapi, juga terkait dengan adanya perubahan pola pikir dan nilai-nilai para aktor untuk menjalankan usaha pertanian dengan mempertimbangkan keuntungan secara social, ekonomi sekaligus ekologi. Adanya dukungan struktur, kultur, ekologi, dan pola-pola relasi yang kondusif, pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya sejak dirintis tahun 2002 hingga kini, berkembang hingga mampu membuka pasar ekspor sejak tahun 2008 sampai saat ini.

Kelembagaan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya tersebut mengindikasikan proses-proses mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun pembangunan berkelanjutan dari perspektif sosiologi lebih difokuskan pada dimensi manusia dalam pembangunan, sehingga dengan memilih untuk mengkonseptualisasikan pembangunan berkelanjutan dari dimensi manusia, maka dititikberatkan pada keberlanjutan sistem sosial masyarakat (Gale and Corday, 1994). Para sosiolog akan menempatkan keberlanjutan sistem sosial, partisipasi dan pemberdayaan sebagai poin penting dalam mengklarifikasi pembangunan yang berkelanjutan tersebut (Gale and Corday, 1994, and Lele, 1991). Sehubungan dengan itu, keberlanjutan sistem sosial diinterpretasikan sebagai keberlanjutan kelembagaan.

Menurut Cernea (1993), dalam perspektif sosiologi, terdapat dua elemen yang dapat menjadi alat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang juga berarti menjadi faktor pendukung terwujudnya kelembagaan berkelanjutan. Kedua elemen tersebut yaitu adanya pengorganisasian sosial (*social organization*) dan teknik sosial (*social techniques*). Pertama, pengorganisasian sosial sebagai konsep yang membantu menjelaskan mengenai aksi sosial, hubungan antar manusia, bentuk kompleks dari organisasi sosial, perencanaan kelembagaan, dan aspek budaya, motivasi, stimulus, dan nilai yang meregulasi perilaku dalam berhadapan dengan sumber daya alam. Pengorganisasian sosial merupakan bangunan sosial yang mencakup para pelaku sosial itu sendiri; kontrak sosial yang mengatur hubungan antara masyarakat lokal dengan para *stakeholder*; hak-hak pengelolaan sumber daya alam yang merujuk pada sistem budaya setempat, meliputi hak kepemilikan, penguasaan, atau penentuan orang yang memiliki peran sebagai "*public building*"; sistem otoritas dan mekanisme penguatan kepatuhan; ketiadaan batas-batas antara selang pengorganisasian produksi dari sistem berbasis keluarga menjadi perusahaan besar; pertukaran jaringan tenaga kerja; termasuk nilai dan sistem kepercayaan setempat.

Kedua, adanya teknik sosial yang tepat untuk mempercepat koordinasi aksi sosial, mencegah keburukan perilaku, membantu perkembangan asosiasi, keahlian dalam perencanaan sosial, dan pembangunan modal sosial. Teknik sosial sebagai alat untuk mencapai pembangunan



yang berkelanjutan ini berada pada selang dari membangun kesadaran publik hingga berinvestasi dalam membangun modal sosial, dari konsultasi-konsultasi sederhana hingga membangun pengelolaan partisipatif, dari sistem insentif hingga kontrol kelembagaan, dari tradisi hingga merubah praktik lama dan memperkenalkan inovasi baru, dari pemberdayaan hingga membentuk kohesi sosial, dari perilaku individu yang bermotif ekonomi hingga membangun kekuatan solidaritas, kepercayaan, pengorganisasian diri dan penerimaan nilai-nilai kelompok. Alat tersebut juga dapat dikombinasikan untuk merubah pola-pola sosial alat dan mempromosikan budaya dari proteksi sumber daya alam.

Pengorganisasian sosial dan teknik sosial dalam mewujudkan keberlanjutan kelembagaan pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Pengorganisasian sosial tersebut diawali dengan berkembangnya program-program pembangunan pertanian seperti halnya budidaya padi dengan *system rice of intensification* (SRI), program Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), program pola tanam terpadu, sosialisasi pembuatan dan pemanfaatan pestisida nabati dan lain-lain. Penguatan pertanian organik didorong dengan berdirinya Gabungan Kelompok Tani Simpatik yang beranggotakan 11 kelompok tani dari 4 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dan adanya dukungan para pengelola Gapoktan yang berkomitmen dan berdedikasi tinggi. Dengan adanya program-program tersebut dan terlebih dengan berdirinya Gapoktan Simpatik membuka ruang dialog bagi para petani padi organik dengan aktor lainnya untuk menyampaikan pendapat dan saling bertukar informasi. Seperti halnya para petani berdiskusi secara langsung dengan pengelola Gapoktan dan eksportir mengenai kesepakatan harga, petani berdiskusi dengan para sertifikator nasional maupun internasional mengenai pelaksanaan sertifikasi, dan petani juga memiliki ruang dialog bersama dengan pihak swasta seperti halnya pihak Bank Indonesia untuk mendiskusikan berbagai peluang pengembangan pertanian organik. Selain itu, petani juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan pihak akademisi dengan adanya berbagai kunjungan kegiatan penelitian di bidang pertanian organik, dengan pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melalui kunjungan kerja, studi banding, dan pelatihan. Bahkan berdiskusi dengan para tamu asing yang berkunjung melalui Gapoktan Simpatik untuk mengetahui seputar proses pengembangan pertanian organik yang berhasil menembus pasar internasional tersebut. Dari proses-proses tersebut maka pengelola Gapoktan Simpatik saat ini menyusun tata aturan dalam bentuk paket kunjungan ke Gapoktan Simpatik agar berbagai kegiatan diskusi bersama dengan para petani lebih terkoordinasi dengan baik. Hal lain yang sangat penting adalah hasil diskusi mengenai kesepakatan harga antara para petani padi organik, pengelola Gapoktan Simpatik, dan pihak eksportir adalah tersusunnya kontrak kesepakatan kerja sama. Pasal-pasal



kerja sama yang penting diantaranya adalah bahwa para petani anggota Gapoktan Simpatik harus menjual gabahnya ke Gapoktan Simpatik, dan Gapoktan Simpatik harus menampung gabah yang dihasilkan oleh para anggotanya untuk diolah menjadi beras, dikemas dengan baik, dan dikelola sehingga menjadi produk yang didistribusikan oleh eksportir untuk dijual ke luar negeri. Eksportir melalui Gapoktan Simpatik membeli gabah dari para petani seharga Rp 6000,00. per kilogram gabah kering giling. Proses sertifikasi menjadi bagian dan tata aturan penting dalam mendukung berjalannya kesepakatan tersebut. Beras organik yang diekspor ke luar negeri harus dipastikan sebagai produk yang tersertifikasi secara internasional memenuhi standar-standar organik. Sehubungan dengan itu, setiap kelompok tani anggota Gapoktan Simpatik setiap tahunnya harus menjalani uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi internasional yaitu *Institute Market of Ecology* (IMO). Seiring dengan hal itu, kesepakatan yang dibangun tetap berjalan selaras dengan nilai-nilai para petani khususnya merujuk pada perlakuan-perlakuan pada proses budidaya padi. Kesebelas kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki nilai lokal, tata cara, dan perlakuan yang berbeda-beda dalam berbudidaya padi organik meskipun di sisi lain semuanya memenuhi standar organik secara internasional. Seperti halnya masa tanam yang tidak serempak, masa panen yang berorientasi pada waktu yang ditentukan oleh kepercayaan masyarakat setempat, dan adanya upacara-upacara tertentu pada fase-fase budidaya menjadi hal-hal yang saling dihargai oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada intinya hasil panen tetap dijual kepada Gapoktan Simpatik untuk memenuhi permintaan ekspor.

Adapun teknik-teknik sosial yang dilakukan untuk mempercepat koordinasi aksi social dalam proses pengorganisasian juga diawali dari terselenggaranya program-program pembangunan pertanian di Kabupaten Tasikmalaya. Program-program tersebut menjadi langkah awal membuka kesadaran untuk menerapkan teknik budidaya pertanian organik seperti pola tanam jajar legowo yang salah satu fungsinya adalah merenggangkan jarak tanam sehingga musuh alami dapat masuk lahan sawah untuk memangsa hama padi, pemanfaatan pupuk dan pestisida yang bersumber dari bahan-bahan alami untuk menggantikan pupuk dan pestisida kimia, penggunaan air genangan sawah yang macak-macak, mengembalikan jerami dan gulma ke dalam tanah dan pemanfaatan musuh alami. Selain itu, juga membangun keyakinan bahwa pertanian organik ini mengembalikan hak-hak makhluk hidup di lahan sawah untuk hidup berdampingan dan saling membantu untuk menggemburkan lahan sehingga meningkatkan produktivitas. Tidak membunuh makhluk hidup di lahan sawah dengan adanya penggunaan bahan-bahan kimia. Seiring dengan meningkatnya peran Gapoktan Simpatik dalam mengatur pengelolaan produksi dan distribusi beras organik menjadi upaya untuk mengontrol berjalannya



kelembagaan pertanian organik ini. Sebagai indikator, hingga saat ini semua kelompok tani terus mendukung Gapoktan Simpatik dalam mendistribusikan beras organik yang dihasilkan oleh petani-petani anggota Gapoktan Simpatik di Kabupaten Tasikmalaya. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari upaya Gapoktan Simpatik untuk terus mendampingi para petani anggota kelompok tani melalui proses komunikasi tatap muka maupun melalui media misalnya telepon genggam. Informasi mengenai pelatihan, sosialisasi program, dan kegiatan-kegiatan kunjungan kepada kelompok tani disampaikan melalui teknik komunikasi tersebut, sehingga dengan sebaran wilayah yang cukup berjauhan namun tetap dalam menjalin komunikasi dengan baik. Dengan kelancaran proses komunikasi maka mendukung proses-proses pemberdayaan kepada kelompok tani dan para pihak yang terkait dalam pengembangan pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih dengan adanya ruang dialog antara petani dengan petani, petani dengan pengelola Gapoktan, petani dengan eksportir, petani dengan pemerintah, dan ruang dialog yang dibangun antar setiap aktor menciptakan keterbukaan untuk saling memahami dan mengetahui potensi dan permasalahan masing-masing pelaku. Seperti halnya kesepakatan harga, dukungan penyelenggaraan sertifikasi, penentuan lokasi penerima bantuan, penentuan pengendalian hama tertentu di lokasi tertentu, jenis pelatihan yang diperlukan, kesediaan kelompok untuk menerima kunjungan merupakan hal-hal yang dinegosiasikan oleh para pihak terkait. Kondisi ini turut membangun rasa saling percaya antar pihak-pihak yang terkait dan meningkatkan partisipasi para pihak dalam pengembangan pertanian organik tersebut.

Salah satu penerapan teknik sosial untuk meningkatkan proses-proses partisipatif dalam pengembangan pertanian organik dapat dilakukan dengan teknik partisipasi. Teknik partisipasi (*Technology of Participation/ToP*) adalah sebuah metode yang dapat menurunkan gagasan-gagasan besar mengenai proses partisipasi menjadi langkah-langkah teknis yang mudah diaplikasikan (Nasdian, 2014). Teknologi Partisipatif meliputi metode diskusi (*discussion*), metode lokakarya (*workshop*), metode perencanaan aksi (*action planning*), metode perencanaan strategis (*strategic planning*) (Anonymous, 1994). Metode diskusi adalah (1) dialog yang terfokus pada pokok bahasan atau pengalaman bersama, (2) saling bertukar pikiran tanpa bertengkar, dan (3) memperdalam wawasan/kemampuan memecahkan masalah di antara anggota kelompok. Metode lokakarya adalah (1) wawasan/diskusi yang terfokus dalam suatu kelompok (landasan bersama), (2) membangun konsensus dalam kelompok, dan (3) melangkah ke tindakan bersama. Metode perencanaan aksi adalah (1) menyusun rencana nyata setelah tercapai konsensus pada gagasan program, (2) menciptakan bentuk pertanggung jawaban yang jelas, (3) memprakarsai tindakan bersama dalam kelompok.



Metode teknologi partisipatif meliputi metode diskusi, lokakarya, dan perencanaan aksi diterapkan dengan dinamis bukan merupakan tahapan yang kaku tidak hanya dalam membangun suatu kelembagaan tertentu, namun dalam merupakan proses yang terus menerus dalam membangun kelembagaan-kelembagaan yang memperkuat sistem produksi-distribusi-hingga konsumsi melalui pasar ekspor. Metode-metode tersebut dilakukan secara formal namun lebih efektif secara informal

Implementasi dalam metode teknologi partisipatif memerlukan prasyarat yaitu adanya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin partisipatif mencakup tokoh petani, pengelola Gapoktan Simpatik, Ketua Gapoktan Simpatik, pemerintah (penyuluh pertanian, dinas pertanian), pemilik perusahaan (eksportir), sertifikator baik di level nasional maupun internasional. Para pemimpin tersebut memiliki nilai-nilai dasar kepemimpinan partisipatif yakni pengambilan keputusan diusahakan untuk mempertimbangkan kondisi kelompok, membangun konsensus bersama dengan pendapat dan masukan kelompok, inovatif dan kreatif seperti halnya memilih menerapkan teknik budidaya pertanian organik dan meninggalkan pertanian non organik, melakukan tindakan yang mendukung kelangsungan kelompok seperti halnya mengatur jadwal kunjungan ketika kelompok sibuk mengolah lahan dan kegiatan kelompok lainnya, memberikan solusi ketika anggota kelompok mengalami permasalahan dalam budidaya padi, mengatur pembagian bantuan agar adil kepada anggota kelompok, dan senantiasa berpartisipasi dalam mencari informasi seperti misalnya aktif menghadiri undangan pelatihan-pelatihan.

Metode diskusi memiliki konteks *objective*, *reflective*, *interpretive*, *decisional*. Pada metode diskusi, isu-isu yang menjadi topik diskusi mulai dikembangkan, perspektif dalam mencermati isu-isu tersebut diperluas, berupaya secepat mungkin memperoleh data dari para peserta diskusi, dan membangun struktur perencanaan yang baik untuk memperoleh inti persoalan yang didiskusikan. Pada konteks *objective*, proses yang dilakukan adalah dengan mendiskusikan permasalahan dan hal-hal yang dapat diidentifikasi oleh panca indera. Beberapa hal yang tampak adalah bahwa dengan sistem pertanian non organik maka tanah menjadi keras, mikroorganisme sangat kurang, populasi hama semakin banyak, produktivitas menurun, pendapatan menurun, tidak ada nilai tambah produk padi. Pada konteks *reflective*, yang didiskusikan adalah apa yang dirasakan sebagai permasalahan yakni merasakan dampak negatif pertanian non organik seperti merasakan kesulitan mengolah tanah yang keras, merasakan kesulitan mengatasi hama yang semakin resisten terhadap pestisida kimia, merasakan kecewa karena produktivitas menurun, merasakan kecewa karena pendapatan yang menurun. Merujuk pada konteks *objective* dan *reflective*, maka pada konteks *interpretive*, interpretasi atas



permasalahan yang diidentifikasi oleh panca indera dan juga dirasakan yakni bahwa penerapan sistem pertanian organik merupakan langkah kongkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun sebagai *decision* adalah menerapkan sistem pertanian organik pada budidaya padi, menjadi anggota kelompok dan bergabung dengan Gapoktan Simpatik sebagai arena, media, wadah pengorganisasian sosial.

Setelah metode diskusi dilaksanakan, maka metode selanjutnya adalah metode lokakarya. Metode lokakarya (*workshop*) memiliki konteks eksplorasi ide dan gagasan (*brainstorm*), mengelola kegiatan (*organize*), menamai kegiatan. Pada metode lokakarya ini meliputi kegiatan pengembangan kreativitas atau energi dalam jangka waktu yang cukup pendek, mendorong tanggung jawab tim, membantu percepatan integrasi pemikiran yang mendorong terobosan, membangun konsensus praktis. Metode lokakarya tersebut tampak dengan terbangunnya konsensus diantara para petani padi organik untuk menerapkan sistem pertanian organik, konsensus para petani untuk tergabung dalam kegiatan Gapoktan Simpatik, konsensus untuk terlibat dalam proses sertifikasi nasional dan internasional, konsensus untuk terlibat dalam pasar internasional dimana padi organik dari Gapoktan Simpatik sudah diekspor ke Jerman, Amerika, Belgia, Malaysia.

Setelah konsensus dibangun bersama, maka metode lebih lanjut adalah metode perencanaan aksi. Metode perencanaan aksi (*action planning*) memiliki konteks kemenangan, realitas saat ini, komitmen, aksi-aksi kunci, kalender, tugas-tugas. Metode perencanaan aksi meliputi kampanye atau proyek rentang jangka pendek, peluncuran program atau proyek dengan kegiatan, membangkitkan komitmen dari semua tim, interrelasi aktivitas yang saling berkaitan. Metode perencanaan aksi tersebut ditunjukkan dengan terbangunnya rencana aksi dan tindakan para anggota kelompok. Perencanaan aksi cenderung dilakukan secara dalam pertemuan informal, baik di rumah salah satu ketua kelompok tani, di sekretariat Gapoktan Simpatik, atau di rumah Ketua Gapoktan. Rencana aksi biasanya dituliskan dalam *flipchart* yang ditempelkan di kantor sekretariat sebagai target bersama dari Gapoktan Simpatik.

Semua metode tersebut merupakan bagian dari metode perencanaan strategis (*strategic planning*) yang memiliki konteks adanya visi, beragam kontradiksi, arah-arah strategis, dan implementasi. Metode perencanaan strategis meliputi diawali dengan visi umum dan tujuan-tujuan dengan implementasinya, keterlibatan yang luas lintas organisasi, pengambilan keputusan berdasarkan pada realitas saat ini, perencanaan yang fleksibel disertai dengan membangun ulasan-ulasan. Semua metode yang menjadi bagian dari upaya pengorganisasian sosial dan



teknik sosial tersebut beorientasi pada proses yang ditujukan untuk pemeliharaan sistem yakni keberlanjutan kelembagaan pertanian organik di Kabupaten Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Perkembangan sistem pertanian organik tidak hanya menunjukkan adanya perubahan dalam teknik budidaya tanaman dari sistem pertanian konvensional menjadi organik, namun juga meliputi perubahan-perubahan dalam interaksi dan relasi aktor, tata aturan, nilai, dan norma yang dibangun, dan pengelolaan sumber daya yang dimanfaatkan. Perubahan-perubahan tersebut mendorong terbangunnya kelembagaan yang berperan untuk memperkuat dan meningkatkan manfaat dari sistem pertanian organik dari aspek sosial, ekonomi, maupun ekologi. Kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan diharapkan dapat terbangun untuk menjamin pemanfaatan yang terus-menerus dari penerapan sistem pertanian tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa proses diskusi melalui metode ORID, upaya membangun konsensus melalui kegiatan lokakarya, dan proses perencanaan aksi melalui *workshop* merupakan rangkaian teknologi partisipatif dalam pengorganisasian komunitas dan penerapan teknik sosial yang menjadi salah satu alternatif dalam rangka penguatan kelembagaan pertanian organik yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous 1994. *Technology of Participation : Focusing Collective Power for Change. Group Facilitation Methods*. USA: The Institute Cultural Affairs.
- Ariesusanty, L., Sri Nuryati, Rasdi Wangsa. 2014. *Statistik Pertanian Organik Indonesia 2013*. Bogor: Aliansi Organik Indonesia.
- Cernea, M.M. 1993. *The Sociologist's Approach to Sustainable Development*. Paper Series No. 2, World Bank.
- Eicher, C. K. and John M. Staatz 1998. *International Agricultural Development*. London: John Hopkins University Press.
- Gale, R.P And S. M. Corday. 1994. *Making Sense of Sustainability : Nine Answer to What Should Be Sustained*". *Rural Sociology* 59 : 311-332.
- Herdiman, V. 2008. *Berjuang Memperkenalkan Makanan Organik*. *Jurnal Nasional*, Minggu, 27 April 2008.
- Indriana, H. 2004. *Penerapan Teknik Pertanian Organik pada Budidaya Kentang. Kasus pada Petani Kentang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung*: Skripsi. Institut Pertanian Bogor: Bogor.



Indriana, H., Fredian Tonny, Nurmala K Pandjaitan. 2012. *Kelembagaan dalam Sistem Pertanian Padi Sehat*. Jurnal Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan. vol. 6, no 3, Desember 2012.

Kompas 2014. *Pertanian Pasar Produk Organik Terus Meningkat*. Kamis, 19 Juni 2014. Halaman: 18.

Lele, S. 1991. *Sustainable Development : A Critical Review*. *World Development*, vol. 19. no. 6. Pp. 607-621.

Lockeretz, W. 2007. *What Explain The Rise of Organic Farming ?*. In Book : *Organic Farming : An Internasional History*. India : www.Cabi.Org.

Nasdian, F. T. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Padmanabhan, M. and Volker Beckman. 2009. *Institution and Sustainability : Introduction and Overview*. In Book : *Institution and Sustainability : Political Economy of Agriculture and The Environment* : Essay In Honour of Konrad Hagedorn. London: Springer.